



Evaluasi Program Sertifikasi CHSE Desa Wisata Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Septi Wulandari ¹⁾; Esa Septian ²⁾

^{1) 2)} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bojonegoro

Email: ¹⁾ septiwuland09@gmail.com; ²⁾ esaseptian28@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 April 2025]

Revised [30 Mei 2025]

Accepted [03 Juni 2025]

KEYWORDS

CHSE (Clean, Health, Safety, Environment), Sustainable Tourism, Economic Recovery.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) yang diterapkan di destinasi wisata Kabupaten Sleman dalam rangka pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi COVID-19. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka dan analisis kebijakan yang fokus pada indikator input, output, dan outcome dari program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CHSE dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap kebersihan dan keamanan destinasi wisata. Namun, ada tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama pada destinasi wisata dan desa wisata yang belum sepenuhnya memahami prosedur sertifikasi serta menghadapi kendala biaya. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan pelatihan, sosialisasi, dan dukungan teknis bagi pengelola destinasi wisata untuk memperluas penerapan CHSE, terutama di desa wisata. Penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai pemulihan sektor pariwisata di Indonesia dengan menyoroti tantangan implementasi sertifikasi CHSE di tingkat destinasi wisata, yang penting untuk kebijakan pariwisata berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of the CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) Certification Program implemented in tourist destinations in Sleman Regency for the recovery of the tourism sector post-COVID-19 pandemic. Using a qualitative approach with a case study method, this research collects data through literature review and policy analysis, focusing on the input, output, and outcome indicators of the program. The findings show that the CHSE program can enhance tourists' trust in the cleanliness and safety of tourist destinations. However, significant challenges were found in its implementation, particularly in tourist destinations and village tourism, which have not fully understood the certification procedures and face financial constraints. The implications of this study highlight the importance of improving training, socialization, and technical support for destination managers to expand the application of CHSE, especially in village tourism. This research contributes to the literature on the recovery of the tourism sector in Indonesia by emphasizing the challenges of implementing CHSE certification at the destination level, which is crucial for sustainable tourism policies.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri pariwisata di Indonesia. Berdasarkan penelitian oleh (Auladi et al., 2023), tercatat bahwa sebanyak 10.946 usaha pariwisata mengalami dampak langsung dari pandemi, dengan lebih dari 30.421 pekerja di sektor ini kehilangan pekerjaan. Sektor pariwisata sendiri merupakan sektor yang menyumbang 11,83% terhadap tenaga kerja nasional pada tahun 2019 (Utami & Kafabih, 2021). Selain itu, kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mencapai sekitar 4 persen per tahun. Dampak besar juga dirasakan oleh desa wisata yang mengalami penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan akibat pandemi. Sebagai sektor yang sangat bergantung pada kedatangan wisatawan, sektor informal seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makanan, turut merasakan dampak besar dari penurunan permintaan yang signifikan. Sedangkan sektor yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19, yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (Tustianti & Prihatinningsih, 2020).

Pemerintah daerah di Indonesia kini tengah berupaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk pariwisata guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Keberhasilan dalam mempromosikan pariwisata, khususnya untuk menarik wisatawan mancanegara, diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang bagi masuknya investasi dalam sektor pariwisata (Wulandari & Septian, 2024). Dalam hal ini, sektor pariwisata berfungsi sebagai salah satu pilar utama penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Namun, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah kunjungan, terutama pada masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengharuskan penutupan destinasi

wisata. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional pariwisata, mulai dari pemilik homestay, petugas keamanan, hingga pengelola desa wisata, yang harus menanggung biaya operasional meskipun dengan jumlah pengunjung yang sangat terbatas. Pariwisata merupakan sektor unggulan dalam prioritas daya tahan nasional. Langkah strategis dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat melalui penataan kembali destinasi wisata. Eksistensi pariwisata mampu mendorong motivasi dan semangat para pelaku wisata untuk mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 dan diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat desa. Dukungan pemulihan pariwisata telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Tujuan dari Renstra ini memperkuat skenario dan strategi pembangunan kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif nasional yang lebih terarah, terpadu dan terukur dengan memastikan partisipasi *stakeholders* dalam membangun ekosistem kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan sebagai acuan dalam mengadakan program-program selanjutnya.

Dunia pariwisata Indonesia memerlukan adaptasi dengan kondisi *New Normal* dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, serta implementasi protokol kesehatan. Pergeseran model bisnis dalam ekonomi kreatif dapat menjadi *oportunitas* dan peluang dalam kontribusi ekonomi kreatif yang lebih besar. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam (Utami & Kafabih, 2021), menyusun 6 langkah dalam *supply* dan *demand* di sektor pariwisata, yaitu 1) mempersiapkan destinasi wisata; 2) membangun infrastruktur konektivitas yang kompetitif dengan negara-negara lain; 3) implementasi dan monitoring penerapan protokol CHSE di daerah; 4) menciptakan dan membangun daya tarik wisata; 5) meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja ekonomi kreatif; 6) meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ekonomi kreatif. Dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam menciptakan destinasi wisata yang menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengagas program sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*) dengan sasaran pelaku industri pariwisata dalam meningkatkan protokol kesehatan dan kebersihan di lokasi usahanya. CHSE merupakan panduan operasional untuk sektor Pariwisata dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Upaya dalam memperketat protokol kesehatan di tempat wisata tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Penerapan sertifikasi CHSE sebagai upaya mengembalikan kepercayaan wisatawan dengan aman, nyaman, dan sehat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (Posumah et al., 2022). Hal ini diperlukan jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Penelitian (Wicaksono & Suradi, 2021), menunjukkan bahwa Pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan sesuai protokol Kesehatan dan panduan yang ada dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andy (2020), penerapan protokol CHSE bagi destinasi wisata ini bukan saja untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 saja. Melainkan juga untuk menata ulang destinasi wisata agar dapat bertransformasi menuju destinasi yang lebih baik lagi dengan mengutamakan aspek keberlanjutannya. Dengan demikian, Adanya program CHSE menciptakan proses perubahan adaptasi baru bagi destinasi wisata yang aman dari penyebaran COVID-19. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan menongkrak perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Penulis menggunakan *analisis of policy* dalam menganalisis kebijakan yang sudah ada, yaitu program sertifikasi CHSE destinasi wisata. *Analisis of policy* dapat mencakup target dan sasaran serta isi program. Sifat evaluasi kebijakan yang digunakan dalam evaluasi program sertifikasi CHSE Pariwisata, yaitu *on going evaluation*. (Wollmann, H. dalam Fischer, Frank. Miller, Gerald J & Sidney, 2007), *on going evaluation* untuk mengidentifikasi efek (sementara) dan hasil program kebijakan serta langkah-langkahnya selama siklus kebijakan dalam realisasinya masih sedang berjalan. Proses *on going evaluation* mengidentifikasi tahapan tertentu dari implementasi kebijakan dengan “meluruskan” kembali proses implementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai.

Efektifitas (*effectiveness*) menunjukkan bahwa hasil yang diinginkan telah tercapai. Efisiensi (*Efficiency*) menunjukkan seberapa banyak usaha mencapai tujuan-tujuan program. Kecakupan menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan permasalahan yang ada. Perataan (*Equity*) berhubungan dengan distribusi akibat dan usaha pada kelompok dalam masyarakat. Responsivitas (*Resonsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan/program



dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat. Kriteria ketepatan (*Appropriateness*) berhubungan dengan hasil yang dicapai mendatangkan manfaat. Efektifitas sebagai indikator dalam program sertifikasi CHSE untuk melihat tingkat ketercapaian program yang sedang berjalan pada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Efektifitas sangat relevan dalam memperoleh hasil evaluasi dimana, program CHSE diinisiasi dalam melakukan penanganan COVID-19 dan pemulihan pariwisata khususnya di Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang terjadi secara menyeluruh. Seperti yang diungkapkan oleh Geertz dalam (Yusanto, 2019), studi kasus memberikan gambaran tentang proses yang kompleks dengan melihat fenomena dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ini dianggap efektif untuk mengevaluasi program CHSE pada destinasi wisata di Kabupaten Sleman, karena dapat menggali berbagai dimensi dan faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Informasi yang diperoleh melalui media perantara ini kemudian dianalisis untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti (Bungin (2013). Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, sebagaimana dikemukakan dalam Yusuf (2014). Proses analisis ini meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menyajikan hasil analisis yang sistematis dan terstruktur, sehingga dapat memberikan wawasan yang jelas terkait evaluasi program CHSE di destinasi wisata tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Sertifikasi CHSE destinasi wisata

Program Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE) adalah kebijakan yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Kemenparekraf) untuk sektor pariwisata dengan tujuan utama mengurangi penyebaran COVID-19 dan memastikan keamanan wisatawan di destinasi wisata. Program ini memberikan panduan bagi pengelola destinasi wisata, karyawan, wisatawan, serta kelompok sadar wisata dan pihak terkait lainnya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat di seluruh sektor pariwisata. Sosialisasi kepada wisatawan melalui edukasi, demonstrasi, dan cara lainnya menjadi salah satu bentuk implementasi dari program ini (Arlinda, F & Sulistyowati, 2021). Penerapan program CHSE ini bertujuan untuk membangun kepercayaan wisatawan terhadap keamanan destinasi wisata selama masa pandemi. Namun, program sertifikasi CHSE tidak bersifat wajib untuk setiap destinasi wisata, meskipun Kemenparekraf menyediakan dana untuk membiayai seluruh proses sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para pelaku industri pariwisata untuk mendaftar program ini masih perlu didorong. Sektor pariwisata kelas menengah ke atas telah berhasil mendapatkan sertifikasi CHSE, sementara sektor pariwisata menengah ke bawah menghadapi kendala dalam implementasi, terutama karena kurangnya kesadaran dan kesulitan dalam menerapkan indikator-indikator yang ada dalam pedoman CHSE (Zainab, 2022). Program ini bertujuan untuk menciptakan destinasi wisata yang aman, sehingga dapat menarik wisatawan yang semakin sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan.

Di masa pandemi COVID-19, sektor pariwisata dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kesehatan dan keamanan para wisatawan. Hal ini tercermin dari preferensi wisatawan yang kini lebih mengutamakan destinasi yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Perilaku wisatawan yang lebih memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap destinasi wisata. Oleh karena itu, penerapan program CHSE bukan hanya sebagai respons terhadap pandemi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan pola permintaan pariwisata yang lebih berkelanjutan di masa depan. Tujuan dari penerapan program ini adalah untuk membangun destinasi wisata yang tidak hanya aman, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi sektor pariwisata (Tandilino, 2021).

Program sertifikasi CHSE tidak mewajibkan setiap destinasi wisata untuk mendaftar, hal ini perlu ditumbuhkan kesadaran bagi para pelaku wisata untuk mendaftarkan diri dan dibiayai seluruhnya oleh Kemenparekraf. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk pelaksanaan sertifikasi CHSE. Untuk itu memang sektor usaha pariwisata kelas menengah ke atas sudah mendapat sertifikasi CHSE dan untuk

sektor usaha pariwisata menengah ke bawah memang terkendala dari pelaku usahanya sendiri yang belum menerapkan indikator-indikator yang ada di pedoman CHSE (Zainab, 2022). Peluang pariwisata di masa pandemi COVID-19 harus menjamin kesehatan dan keamanan para wisatawan sehingga dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini menunjukkan preferensi para wisatawan dalam memilih tujuan destinasi wisata. Pola permintaan dan perilaku wisatawan kedepan akan sangat dipengaruhi kesadaran terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi. Tujuan penerapan program CHSE menurut (Tandilino, 2021) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dari segi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan yang menjadi fokus yang penting akibat pandemi COVID-19.
- b. Dalam beradaptasi dengan lingkungan pola permintaan dan perilaku wisatawan ke depan akan sangat dipengaruhi kesadaran terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi.
- c. Kesiapan dunia pariwisata untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan terhadap produk pelayanan yang diberikan.
- d. Faktor utama dalam menarik kunjungan wisatawan terdapat pada daya tarik wisata berdasarkan potensi daerah.

Perlunya dalam menyusun panduan praktis bagi destinasi wisata dalam memberikan produk layanan. Program CHSE dapat diandalkan untuk memulihkan ekonomi nasional pasca-COVID-19. Berikut ini ruang lingkup penerapan CHSE antara lain:

Tabel 1. Ruang Lingkup CHSE

No.	Ruang Lingkup	Cakupan
1.	Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencuci tangan pakai sabun/<i>hand sanitizer</i>. • Ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun. • Pembersihan ruang dan barang publik dengan disinfektan/cairan pembersih lain aman dan sesuai. • Bebas vektor dan binatang pembawa penyakit. • Pembersihan dan kelengkapan toilet bersih. • Tempat sampah bersih.
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari kontak fisik, pengaturan jarak aman, mencegah kerumunan. • Tidak menyentuh bagian wajah, mata, hidung, mulut. • Pemeriksaan suhu tubuh. • Memakai APD yang diperlukan. • Menerapkan etika batuk dan bersin Pengelolaan makanan dan minuman yang bersih dan higienis. • Peralatan dan perlengkapan kesehatan sederhana. • Ruang publik dan ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik. • Penanganan bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi.
3.	Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur penyelamatan diri dari bencana. • Ketersediaan kotak P3K. • Ketersediaan alat pemadam kebakaran. • Ketersediaan titik kumpul dan jalur evakuasi. • Memastikan alat elektronik dalam kondisi mati ketika meninggalkan ruangan. • Media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat.
4.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan. • Pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien, sehat demi menjaga keseimbangan ekosistem. • Pengolahan sampah dan limbah cair dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan. • Kondisi lingkungan sekitar asri dan nyaman, baik secara alami atau dengan rekayasa teknis. • Pemantauan dan evaluasi penerapan panduan dan SOP Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan

Sumber: (Kemenparekraf, 2020)



Berdasarkan analisis dari tabel yang ada, program sertifikasi CHSE memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur protokol kesehatan di setiap titik lokasi yang memiliki potensi kerumunan dan penularan COVID-19. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penularan dengan memastikan bahwa setiap destinasi wisata menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Program ini tidak hanya fokus pada kesehatan individu, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, dengan menekankan pentingnya keterlibatan pengelola dan penyelenggara dalam menjaga keamanan dan kesehatan di fasilitas umum.

Penerapan program ini melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh pengelola destinasi wisata. Salah satunya adalah promosi kesehatan yang aktif, yang mencakup edukasi kepada wisatawan dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan. Selain itu, peningkatan fasilitas penyediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer, dan masker menjadi aspek vital dalam pencegahan penularan. Dengan adanya fasilitas tersebut, wisatawan dapat lebih mudah menjaga kebersihan diri saat beraktivitas di destinasi wisata.

Selain itu, program sertifikasi CHSE juga mengatur penyediaan fasilitas deteksi dini untuk mengidentifikasi masyarakat yang bergejala COVID-19. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, karena dapat meminimalkan potensi penyebaran virus di area wisata. Penanganan yang cepat dan efektif juga menjadi bagian dari program ini, dengan pengelola destinasi wisata diharapkan mampu mengambil tindakan segera jika ditemukan indikasi adanya kasus positif COVID-19. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi pengunjung serta masyarakat sekitar, sekaligus mendukung pemulihan sektor pariwisata di masa pandemi.

Evaluasi Program Sertifikasi CHSE destinasi wisata di Kabupaten Sleman

A. Input, Output dan Outcome Program Sertifikasi CHSE Destinasi Wisata di Kabupaten Sleman

1) Input Program

Pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19 melibatkan berbagai langkah strategis, salah satunya adalah penggiatan program perlindungan sosial bagi pekerja pariwisata. Pemerintah melakukan realokasi anggaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mendukung kegiatan padat karya serta memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku usaha. Dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menerima anggaran sebesar Rp 2,4 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa program PEN ini diharapkan dapat membantu sektor pariwisata untuk mempertahankan lapangan kerja yang terdampak pandemi, serta mendukung keberlanjutan usaha di sektor ini (Safitri, 2021).

Salah satu bentuk pemulihan yang diupayakan pemerintah adalah program sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, Environment) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, serta mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Berdasarkan survei pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan 52,52 persen usaha pariwisata mengurangi jumlah pekerjanya, sehingga program sertifikasi ini menjadi salah satu solusi yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan kembali sektor pariwisata. Melalui anggaran PEN sebesar Rp 2,4 triliun, pemerintah menyelenggarakan program sertifikasi CHSE untuk sektor pariwisata yang bertujuan untuk memastikan bahwa destinasi wisata memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (Widyanti, 2021).

Pada tahun anggaran 2021, Kemenparekraf telah menyiapkan dana sebesar Rp 60 miliar untuk mendukung pelaku usaha pariwisata dalam mendapatkan sertifikasi CHSE. Program ini memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk meningkatkan fasilitas dan prosedur yang sesuai dengan standar CHSE, guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan menjamin keamanan para wisatawan. Dengan adanya sertifikasi CHSE, diharapkan wisatawan merasa lebih aman untuk berkunjung ke destinasi wisata, serta sektor pariwisata dapat segera pulih dari dampak pandemi yang cukup parah.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pemulihan ekonomi sektor pariwisata dengan mengalokasikan anggaran yang besar, yaitu Rp 2,4 triliun. Dana ini digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas di sektor pariwisata yang memenuhi kriteria CHSE, seperti fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, serta prosedur protokol kesehatan yang ketat. Dengan penerapan program ini, diharapkan sektor pariwisata dapat segera pulih, meningkatkan jumlah wisatawan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata di masa depan.

2) *Output Program*

Dalam penerapan program sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, Environment) di Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata mencatat bahwa baru ada 15 destinasi wisata yang berhasil mendapatkan sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Jumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman mencapai 146 objek wisata dan 54 desa wisata, namun hanya sebagian kecil yang memenuhi standar CHSE. Selain itu, sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi ini meliputi kesiapan protokol kesehatan (prokes), penggunaan QR code PeduliLindungi, capaian vaksinasi, serta izin dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada program sertifikasi, standarisasi yang diterapkan pada pelaku wisata di Sleman masih terbilang minim (Syarifudin, 2021).

Desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman juga mengalami tantangan serupa, di mana hanya 1 desa wisata yang telah memperoleh sertifikasi CHSE hingga saat ini (Umadiyah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa program sertifikasi CHSE belum diterapkan secara merata di seluruh objek wisata, terutama di desa wisata yang mayoritasnya dikelola oleh masyarakat lokal. Salah satu alasan utama rendahnya jumlah desa wisata yang memperoleh sertifikasi ini adalah kendala dalam proses pendaftaran dan pengajuan sertifikasi, baik itu terbatasnya kuota di DIY maupun antrian panjang yang harus dihadapi pelaku wisata yang ingin mendaftar.

Proses pendaftaran sertifikasi CHSE memang tidak semudah yang dibayangkan, karena terdapat sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Implikasi dari terbatasnya kuota pendaftaran di DIY membuat jumlah objek wisata yang telah memiliki sertifikat CHSE masih minim, terutama jika dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti hotel dan restoran. Hingga saat ini, destinasi wisata yang telah mendapatkan sertifikasi di Kabupaten Sleman masih berada di bawah 50%, menandakan bahwa implementasi program CHSE belum optimal. Hal ini menandakan adanya kendala dalam mencapai sasaran sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan minimnya jumlah sertifikasi CHSE di Kabupaten Sleman. Pertama, banyak pengelola objek wisata yang belum mengetahui cara mendaftarkan tempat wisata mereka agar mendapatkan sertifikat CHSE. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam mengenai prosedur pendaftaran dan manfaat sertifikasi CHSE bagi pengelola dan wisatawan. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai proses ini, pengelola mungkin merasa kesulitan untuk mengikuti persyaratan yang ada.

Kedua, terdapat ketakutan dari para pengelola objek wisata terkait biaya yang mungkin timbul dalam proses perpanjangan sertifikat CHSE di masa depan. Selain itu, pengelola juga merasa terbebani dengan banyaknya item syarat dan pertanyaan yang harus dijawab dalam asesmen untuk mendapatkan sertifikasi. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi mereka yang harus memenuhi berbagai persyaratan yang dianggap rumit dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Dengan adanya berbagai kendala ini, perlu ada upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan teknis, dan kemudahan dalam proses pendaftaran untuk memastikan bahwa lebih banyak destinasi wisata di Kabupaten Sleman dapat memenuhi standar CHSE.

3) *Outcome Program*

Perubahan dalam tatanan tempat wisata di masa pandemi COVID-19 telah membawa dampak positif, terutama dalam menjadikan wisata lebih ramah lingkungan dan lebih memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu contoh penerapan protokol kesehatan yang baik adalah di desa wisata Jaka Garong. Di sini, pengelola tempat wisata telah menerapkan berbagai langkah sesuai dengan prosedur pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Pengunjung diharuskan untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer saat tiba, dilakukan pengecekan suhu tubuh, serta wajib mengenakan masker. Selain itu, pengunjung juga diingatkan untuk menjaga jarak, tidak sering menyentuh peralatan yang digunakan bersama, dan selalu membersihkan peralatan setelah digunakan. Pengunjung juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti menjalani pola hidup sehat dan tidak berjabat tangan (Desawisatagarongan.com, 2020).

Program sertifikasi CHSE memberikan dampak positif dalam mempersiapkan destinasi wisata menyambut kembali kunjungan wisatawan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan uji coba pembukaan tempat wisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya adalah wisata Tebing Breksi. Uji coba pembukaan ini dilakukan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/IL.04.00 DII/2021 yang berisi panduan penggunaan aplikasi PeduliLindungi serta protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh pengelola dan pengunjung. Dengan memiliki sertifikat CHSE dari Kemenparekraf, Tebing Breksi memenuhi salah satu persyaratan penting dalam uji coba tersebut. Hal ini



menunjukkan bahwa program sertifikasi CHSE tidak hanya memberikan manfaat dalam memastikan bahwa tempat wisata aman dan nyaman, tetapi juga mendukung upaya pemulihan sektor pariwisata di masa pandemi.

Sertifikasi CHSE juga turut memberikan kepercayaan lebih kepada wisatawan, karena pengelola tempat wisata yang telah memenuhi standar protokol kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih aman dan nyaman, serta terhindar dari potensi penularan COVID-19. Selain itu, pengelola destinasi wisata seperti Tebing Breksi juga telah mendapatkan QR Code PeduliLindungi dari Kementerian Kesehatan. QR Code ini digunakan untuk memudahkan proses verifikasi status kesehatan pengunjung, sehingga memastikan bahwa wisatawan yang datang telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol yang berlaku. Dengan adanya sertifikasi CHSE dan penerapan QR Code PeduliLindungi, destinasi wisata di Kabupaten Sleman diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, serta turut mendukung pemulihan ekonomi sektor pariwisata di masa pandemi (Suryana, 2021).

Analisis Program Sertifikasi CHSE Destinasi Wisata

a. Kejelasan program CHSE dalam melindungi wisatawan dari COVID-19

Program Sertifikasi CHSE menghasilkan tiga jenis sertifikasi labelling Indonesia Care sendiri meliputi I Do Care yang harus memenuhi 90-100 persen indikator kriteria pelaksanaan CHSE; sertifikat I Do Care dengan rekomendasi, yaitu yang memenuhi syarat 60 sampai 89,99 persen indikator; serta pembinaan I Do Care yang diberikan pada pelaku usaha yang memenuhi kurang dari 60 persen indikator (Kemenparekraf, 2020). Dengan demikian program Sertifikat CHSE memiliki labelling *I DO Car* diberikan kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait pariwisata, lingkungan masyarakat sekitar daya tarik wisata dan/atau fasilitas pariwisata, serta destinasi pariwisata yang telah memenuhi kriteria dan indikator pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (Maulina et al., 2021).

b. Strategi dalam mencapai target dan sasaran program CHSE

Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sleman perlu menyiapkan strategi dalam menghadirkan wisata yang dapat beradaptasi dengan lingkungan. Pasalnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman pada destinasi wisata tanggal 12-16 Mei 2021 menyebut hampir puluhan ribu kunjungan wisatawan terlebih di masa liburan.

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sleman

No.	Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu)
1.	Grojogan Watu Purbo, Kaliurang dan Kaliadem, Embung Senja, Bukit Breksi, Obelix Hills, Bukit Klangon, Blue Lagoon, Plunyon Kalikuning dan Lava Bantal	47.787
2.	Candi Prambanan, Kraton Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Sambisari, dan Candi Banyunibo	12.061
	museum MGM, Ullen Sentalu, dan Monjali	878
3.	wisata buatan Jogja Bay, Studio Alam Gamplong, Jogja Exotarium, Agrowisata Bhumi Merapi, The World Landmark, Sindu Kusuma Edupark	12.979
4.	Wisata yang dikelola kelompok masyarakat	4.016
Total		77.721

Sumber: (Anggara, 2021)

Program CHSE sebagai program yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyambut adaptasi baru bagi sektor pariwisata. Dengan mengedepankan aspek kesehatan para wisatawan merupakan strategi yang tepat dalam menyiapkan destinasi wisata yang semakin mulai diminati kembali pasca kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19. Penerapan CHSE terbilang cukup efektif dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Data yang diperoleh melalui Aplikasi Visiting Jogja, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 11.000 orang pada hari Sabtu dan 30.000 orang pada hari Minggu. Sedangkan pekan-pekan sebelumnya, tercatat jumlah kunjungan mencapai di atas 20.000 orang pada hari Sabtu dan 40.000 orang pada hari Minggu. Jumlah pengunjung hanya 50 persen dari kapasitas yang tersedia (Sari, 2020).

Capaian destinasi wisata yang sudah tersertifikasi CHSE, sangat efektif dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan. Hal ini sebagai upaya dalam menjawab tuntutan bagi penyediaan produk wisata.

Merumuskan program CHSE dalam Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan yang dianggap berhasil adalah pariwisata yang tidak hanya mampu menjaga tingkat kepuasan wisatawan, tetapi juga menjamin pengalaman berkualitas bagi mereka. Tren pariwisata saat ini banyak dipengaruhi oleh dampak pandemi, yang membuat wisatawan semakin cenderung mencari pengalaman pribadi yang dapat memberikan kenangan dan refleksi diri. Oleh karena itu, pariwisata kini lebih mengutamakan kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan daripada hanya mengejar kuantitas pengunjung. Selain itu, pariwisata berkelanjutan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan mengedepankan wisata minat khusus yang menekankan pada pemeliharaan kualitas lingkungan serta kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Keberlanjutan ekologis dalam pariwisata mencakup dimensi waktu, yang berarti tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini tetapi juga memastikan bahwa ekosistem bumi tetap terjaga hingga masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal sangat penting dalam hal ini, karena pariwisata berkelanjutan turut mendukung upaya konservasi pusaka alam dan keanekaragaman hayati. Selain itu, keberlanjutan sosial-ekonomi menjadi hal yang tak terpisahkan, di mana pariwisata harus dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti lapangan kerja yang berkualitas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta pemberantasan kemiskinan di masyarakat lokal.

Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) yang diberikan kepada hampir 11.986 usaha pariwisata, termasuk hotel, restoran, homestay, destinasi wisata, dan usaha transportasi wisata, menjadi salah satu langkah penting dalam revitalisasi sektor pariwisata pasca-pandemi. Sertifikasi ini tidak hanya memenuhi permintaan pasar global yang semakin mengedepankan gaya hidup bersih dan sehat, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan mendapatkan sertifikasi CHSE, pelaku pariwisata menunjukkan komitmen mereka untuk mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan menjaga kualitas pengalaman wisatawan. Oleh karena itu, pelaku pariwisata harus secara konsisten menyadari adanya perubahan dalam pasar wisata yang semakin mengutamakan aspek kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan (Amelia & Prasetyo, 2022).

Salah satu contoh penerapan pariwisata berkelanjutan yang baik dapat dilihat di Desa Wisata Pulesari. Desa ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kebersihan dan keamanan, seperti menyediakan fasilitas cuci tangan di 30 titik, thermogun, serta disinfektan dan hand sanitizer. Pengelola desa juga bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Kalurahan Wonokerto untuk menyiapkan satu unit ambulans yang dapat digunakan oleh masyarakat di tingkat kalurahan. Untuk memperkuat perlindungan terhadap penyebaran COVID-19, seluruh petugas di Desa Wisata Pulesari yang berjumlah 50 orang telah divaksinasi. Desa ini juga meningkatkan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung penerapan protokol kesehatan, seperti pemasangan QR code pada pintu masuk, pengecekan suhu tubuh, serta penyediaan tempat cuci tangan dan standing hand sanitizer.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan keamanan, Desa Wisata Pulesari juga membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Peningkatan akses sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar CHSE menjadi langkah yang penting dalam menjawab tantangan yang dihadapi sektor pariwisata. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung dan koordinasi yang baik antara pengelola, masyarakat lokal, dan pihak terkait, Desa Wisata Pulesari dapat menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Penerapan program CHSE di desa wisata ini merupakan contoh nyata bagaimana pariwisata dapat berkembang dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan serta memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) di destinasi wisata Kabupaten Sleman terbukti memiliki potensi yang signifikan dalam memulihkan sektor pariwisata pasca-pandemi COVID-19. Program ini dapat memberikan jaminan kepada wisatawan bahwa destinasi wisata yang mereka pilih telah memenuhi protokol kesehatan yang ketat, sehingga meningkatkan rasa aman dan nyaman. Evaluasi program melalui indikator input, output, dan outcome menunjukkan bahwa meskipun ada kendala dalam implementasi, seperti rendahnya tingkat pemahaman pengelola wisata dan tantangan biaya, program ini tetap memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, kesehatan, dan keselamatan di sektor pariwisata. Namun, terdapat celah dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan tingkat adopsi program di desa wisata dan objek wisata kecil yang belum sepenuhnya memahami atau mampu memenuhi kriteria CHSE.



Penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program ini, seperti peran masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata atau keterlibatan sektor swasta dalam mendukung implementasi.

Penelitian selanjutnya bisa mengisi celah tersebut dengan mengkaji lebih dalam tentang faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan program CHSE di destinasi wisata yang lebih kecil atau terkelola oleh komunitas lokal. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi pengelola destinasi wisata, khususnya yang berada di bawah pengelolaan masyarakat atau usaha kecil, terkait proses pendaftaran dan implementasi sertifikasi CHSE. Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih dalam bentuk pelatihan dan bantuan teknis untuk memudahkan pengelola dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif terkait manfaat dan prosedur sertifikasi juga sangat penting agar lebih banyak destinasi wisata dapat mendaftar dan memenuhi standar CHSE. Dari sisi kebijakan, disarankan agar pemerintah memperbesar kuota pendaftaran dan memberikan insentif kepada pengelola yang berhasil mendapatkan sertifikasi, agar lebih banyak destinasi wisata yang dapat berpartisipasi.

Meskipun program sertifikasi CHSE telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang kembali berkunjung, terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan, seperti tingginya biaya operasional dan kesulitan dalam memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi tantangan-tantangan ini lebih mendalam dan mencari solusi yang lebih praktis dan terjangkau untuk mendorong destinasi wisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V., & Prasetyo, D. (2022). Sertifikasi Chse (Cleanliness, Health, Safety, & Environment) Terhadap Objek Wisata Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 5(2), 92–99. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i2.49461>
- Andy, H. (2020). *Panduan Pelaksanaan Protokol CHSE bagi Destinasi Wisata*. <https://eticon.co.id/protokol-chse-destinasi-wisata/>
- Anggara, J. (2021). *Sleman Dapat Puluhan Ribu Kunjungan Wisata Saat Libur Lebaran*. <https://kliknusae.com/2021/05/sleman-dapat-puluhan-ribu-kunjungan-wisata-saat-libur-lebaran/>
- Arlinda, F & Sulistyowati, R. (2021). Pengaruh Penerapan Program Adaptasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) Terhadap Kepuasan Pengunjung Destinasi Wisata Kabupaten Kediri di Era New Normal Serta Dampaknya Pada Pengembangan Ekonomi Pariwisata & Industri Kreatif. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*.
- Auladi, F., Rosmalia., & Pratiwi, A. (2023). Evaluasi Program Chse (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability) Di Daya Tarik Wisata Pasar Slumpring. *Bhamada Occupational Health Safety*, 1(2). <https://ejournal.bhamada.ac.id/index.php/BOHSEJ/article/view/594/414>
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Kencana.
- Desawisatagarongan.com. (2020). *Penerapan Protokol CHSE di Desa Wisata Garongan*. <https://desawisatagarongan.com/2020/11/19/penerapan-protokol-chse-di-desa-wisata-garongan/>
- Kememparekraf. (2020). *Model dan Proses Verifikasi & Sertifikasi CHSE*. https://chse.kememparekraf.go.id/storage/app/media/dokumen/Verifikasi_Sertifikasi_CHSE.pdf
- Maulina, L., Dianawati, N., Nugraha, S.Y.I. Maemunah, I., & Sukmadi. (2021). *Pelaksanaan Protokol Kesehatan Berbasis Cleanliness, Health, Safety, And Environment Sustainability (CHSE) Pada Industri Perhotelan Di Kota Bandung*. <http://repository.stp-bandung.ac.id/handle/123456789/1432>
- Posumah, C. H., Jeneetica, M., & Krisnawati, Y. (2022). Penerapan Chse Di Hotel Salak the Heritage Bogor. *Bogor Hospitality Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.55882/bhj.v4i2.28>
- Sari, N. (2020). *Evaluasi Penerapan Protokol CHSE di Pariwisata Yogyakarta*. <https://yoursay.suara.com/news/2020/11/30/120814/evaluasi-penerapan-protokol-chse-di-pariwisata-yogyakarta>
- Suryana, W. (2021). *Tebing Breksi Kantongi Izin Uji Coba*. <https://repjogja.republika.co.id/berita/qzdaq5399/tebing-breksi-kantongi-izin-uji-coba>
- Syarifudin, A. (2021). *Sebanyak 15 Objek Wisata di Sleman Kantongi Sertifikat CHSE*.

- <https://jogja.tribunnews.com/2021/10/02/sebanyak-15-objek-wisata-di-sleman-kantongi-sertifikat-chse>
- Tandilino, S. B. (2021). *Penerapan Sustainable (CHSE) DALAM ERA NORMAL BARU PADA DESTINASI PARIWISATA KOTA KUPANG*. 3(02), 62–68. <http://repository.ucb.ac.id/191/>
- Tustianti, E., & Prihatinningsih, D. . (2020). *Analisis Isu Terkini 2020*.
- Umayyah, S. (2021). *128 Usaha Pariwisata Sleman Sudah Kantongi Sertifikat CHSE*. <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/siti-umaiyah/128-usaha-pariwisata-sleman-sudah-kantongi-sertifikat-chse/3>
- Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 383–389. <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.198>
- Wicaksono, A., & Suradi. (2021). Penerapan Protokol Chse Di Kawasan Wisata Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 15(2), 79–88.
- Widyanti, N. N. W. (2021). *Kemenparekraf Siapkan Program PEN dengan Anggaran Rp 2,4 Triliun*. <https://travel.kompas.com/read/2021/07/27/181000227/kemenparekraf-siapkan-program-pen-dengan-anggaran-rp-2-4-triliun>
- Wollmann, H. dalam Fischer, Frank. Miller, Gerald J & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. CRS Press.
- Wulandari, S., & Septian, E. (2024). A Model for Fishing Tourism Village Development Based on Local Wisdom of the East Coast of Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3215–3221. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12870>
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Edisi Pert). Kencana.
- Zainab, Z. (2022). Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 20(1), 62. <https://doi.org/10.46730/jiana.v20i1.8022>